

MEKANISME PASAR DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI KAPITALIS DAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS PERBANDINGAN

Yunita Maharani¹, Eka Aurora Nurcahyaning Fitria², Hilda Mardhotillah³, Firda Kayla Nafizh⁴, Adelia Nazwa Faradisha⁵, Safinatun Najach⁶, Yumeiko Bintang Kemilau Nisa⁷, Taufiq Kurniawan⁸

S1 Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

- (1) 26081194066@mhs.unesa.ac.id (2) 26081194014@mhs.unesa.ac.id
(3) 26081194054@mhs.unesa.ac.id (4) 26081194176@mhs.unesa.ac.id
(5) 26081194110@mhs.unesa.ac.id (6) 26081194076@mhs.unesa.ac.id (7)
26081194192@mhs.unesa.ac.id (8) taufiqkurniawan@unesa.ac.id

ABSTRAK

Sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki persamaan dalam beberapa aktivitas ekonomi, tetapi berbeda dalam landasan nilai, prinsip, dan tujuan yang mendasarinya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek kepemilikan, kebebasan ekonomi, mekanisme pasar, pembiayaan, distribusi kekayaan, serta orientasi kesejahteraan. Kapitalisme cenderung menekankan kebebasan individu, kepemilikan privat, persaingan, dan pencapaian keuntungan, sedangkan ekonomi Islam menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep, sejarah, karakteristik, serta perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua sistem ekonomi berdasarkan tema-tema utama yang meliputi landasan nilai, kepemilikan, mekanisme pasar, pembiayaan, distribusi, dan kesejahteraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam sama-sama mengenal kegiatan produksi, perdagangan, kepemilikan individu, dan mekanisme pasar, tetapi memiliki batasan dan orientasi yang berbeda. Ekonomi Islam mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah serta menekankan keadilan, keseimbangan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan material, sosial, serta moral. Sementara itu, kapitalisme lebih menonjolkan kebebasan ekonomi, hak kepemilikan privat, persaingan, efisiensi, dan insentif keuntungan. Dengan demikian, perbedaan utama kedua sistem tidak hanya terletak pada mekanisme ekonominya, tetapi juga pada landasan nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ekonomi.

Kata Kunci: *Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Islam, Kepemilikan, Distribusi Kekayaan, kesejahteraan.*

ABSTRACT

Capitalist and Islamic economic systems share several aspects of economic activity, but they differ in their underlying values, principles, and objectives. These differences can be seen in ownership, economic freedom, market mechanisms, financing, wealth distribution, and welfare. Capitalism emphasizes individual freedom, private ownership, competition, and profit, while Islamic economics is based on Sharia principles that emphasize justice, balance, social responsibility, and public benefit. This study

aims to examine and compare the concepts, history, characteristics, and differences between the capitalist and Islamic economic systems. This study uses a qualitative approach through library research by reviewing books, academic journals, and other relevant academic documents. The data were analyzed using content analysis and a comparative approach to identify differences between the two systems in terms of values, ownership, markets, financing, distribution, and welfare. The results show that both systems recognize

production, trade, individual ownership, and market activities, but they differ in their rules and orientations. The Islamic economic system emphasizes Sharia principles, justice, balance, and wealth distribution, as well as material, social, and moral welfare. In contrast, the capitalist system emphasizes economic freedom, private ownership, competition, efficiency, and profit. Therefore, the main difference between the two systems lies not only in their economic mechanisms but also in the values and objectives underlying economic activities.

Keyword: *Capitalist Economic System, Islamic Economics, Ownership, Wealth Distribution, Welfare.*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi berperan sebagai landasan utama dalam mengatur cara suatu masyarakat mengelola sumber daya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang serta jasa guna mencapai kesejahteraan. Dalam konteks global saat ini, kapitalisme dan ekonomi Islam menjadi dua paradigma yang kerap dibandingkan karena memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda secara fundamental. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan kepemilikan swasta atas sarana produksi, kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi, mekanisme pasar yang kompetitif, serta motivasi meraih keuntungan sebagai pendorong utama. Sistem ini telah menjadi salah satu kerangka penting dalam perkembangan perekonomian modern dengan penekanan pada kebebasan ekonomi, kepemilikan privat, persaingan, dan mekanisme pasar (Effendi, 2019; Fauziah & Sarkani, 2023; Haryanto, 2008).

Sebaliknya, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menempatkan kegiatan ekonomi dalam bingkai nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini tidak hanya memandang ekonomi sebagai upaya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki dimensi moral dan tanggung jawab sosial serta diarahkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama (Bakhri, 2011; Abbas, 2012; Azzuhri & Fadhil, 2022). Perbedaan esensial antara kedua sistem ini bukan sekadar pada instrumen atau mekanisme yang dipakai, melainkan pada landasan filosofis yang memengaruhi cara pandang terhadap hakikat kepemilikan, tujuan kegiatan ekonomi, dan kewajiban sosial. Kapitalisme pada umumnya berkembang dari pemikiran yang menekankan kebebasan individu dan kepemilikan privat, sedangkan ekonomi Islam berdasar pada worldview yang bersumber dari wahyu (Ullah, 2023; Fauziah & Sarkani, 2023).

Untuk memahami perbedaan tersebut secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan analisis isi yang dikombinasikan dengan metode komparatif. Melalui sintesis tematik dari berbagai literatur akademik, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola konseptual yang membedakan kedua sistem pada aspek kepemilikan, mekanisme pasar, pembiayaan, distribusi kekayaan, dan orientasi kesejahteraan. Pendekatan tersebut digunakan karena kajian mengenai ekonomi Islam memiliki cakupan konseptual yang beragam, sehingga diperlukan pengelompokan dan perbandingan literatur untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai konsep dan karakteristiknya (Mubarrok et al., 2022). Penting untuk dicatat bahwa perbedaan antara kapitalisme dan ekonomi Islam tidak bisa disederhanakan hanya dengan melihat ada atau tidaknya pasar, kepemilikan pribadi, atau kegiatan produksi, karena kedua sistem sama-sama mengakui fungsi-fungsi ekonomi dasar tersebut. Yang membedakan adalah batasan normatif, tanggung jawab sosial yang menyertai kepemilikan, cara distribusi kekayaan, dan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi itu sendiri (Bakhri, 2011; Effendi, 2019; Dairobi, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, sejarah, karakteristik, serta perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Sumber data utama berasal dari literatur primer dan sekunder yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang membahas fondasi filosofis, prinsip operasional, dan dinamika historis kedua sistem ekonomi tersebut. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan kredibilitas akademik, tahun publikasi, dan relevansinya terhadap fokus kajian, sebagaimana tercermin dalam referensi seperti Abbas (2012), Mannan (1993), dan Ullah (2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengkajian sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yakni: (1) menentukan kata kunci utama seperti "ekonomi Islam", "kapitalisme", "sistem ekonomi", "keadilan distributif", dan "nilai filosofis ekonomi"; (2) menyeleksi dokumen berdasarkan kriteria akademik yang ketat; (3) membaca secara kritis dan mencatat gagasan inti dari setiap literatur; serta (4) mengorganisasikan data ke dalam tema-tema analitis, termasuk konsep kepemilikan, mekanisme pasar, orientasi keadilan, dan efisiensi ekonomi. Referensi seperti Bakhri (2011), Effendi (2019), dan Fauziah & Sarkani (2023) menjadi rujukan penting dalam tahap ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem ekonomi. Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis dimensi konseptual, historis, dan karakteristik operasional dari ekonomi Islam dan kapitalisme, sebagaimana dikaji dalam studi Dairobi (2025), Ilham dkk. (2024), dan Haryanto (2008). Selain itu, sintesis tematik (*thematic synthesis*) diterapkan untuk mengelompokkan temuan ke dalam kategori analitis yang koheren, seperti fondasi nilai, instrumen ekonomi, dan implikasi sosial.

Untuk memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif filosofis dan kerangka konseptual dari berbagai literatur, termasuk karya Azzuhri & Fadhil (2022) tentang Wasatiyya, Kato (2022) mengenai model *econophysics*, serta Khitam (2022) tentang orientasi kerja dalam konteks Islam dan kapitalisme. Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan komparatif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan kapitalis, baik dari segi ontologis, epistemologis, maupun aksologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam memiliki beberapa persamaan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, tapi juga memiliki perbedaan mendasar pada nilai dan prinsip yang mengarahkan kegiatan tersebut. Keduanya sama-sama mengakui adanya aktivitas perdagangan, kepemilikan, dan mekanisme pasar. Namun, hasil sintesis menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada batas kebebasan ekonomi, tanggung jawab kepemilikan, mekanisme distribusi kekayaan, serta orientasi akhir kegiatan ekonomi.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan perbedaan antara kedua sistem itu tidak dapat dipahami hanya dengan melihat apakah suatu instrumen ekonomi digunakan atau tidak. Mekanisme pasar, misalnya dapat ditemukan dalam kedua sistem, tetapi penerapannya berada dalam kerangka nilai dan aturan yang berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa landasan filosofis memiliki pengaruh terhadap cara suatu sistem menentukan batas aktivitas ekonomi dan tujuan yang hendak dicapai.

Hasil Sintesis Literatur : Fondasi Konseptual Ekonomi Islam dan Kapitalisme

Hasil sintesis menunjukkan bahwa perbedaan ekonomi Islam dan kapitalisme tidak terutama terletak pada keberadaan kegiatan produksi, pertukaran, atau pencarian kesejahteraan, melainkan pada fondasi nilai dan cara tujuan ekonomi tersebut dibingkai. Literatur menggambarkan kapitalisme sebagai

<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

sistem yang menekankan hak milik privat, kebebasan ekonomi, mekanisme pasar, dan insentif keuntungan. Sementara itu, ekonomi Islam menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka nilai Islam serta mengaitkannya dengan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perbedaan kedua sistem dapat dipahami sebagai perbedaan kerangka dasar yang kemudian memengaruhi cara aktivitas ekonomi dijalankan (Bakhri, 2011; Effendi, 2019; Fauziah & Sarkani, 2023; Dairobi, 2025).

Dari sisi konseptual, definisi ekonomi Islam memiliki variasi yang perlu diperhatikan dalam penelitian komparatif. Mubarrok, Ulfi, dan Izzulhaq (2022) mengelompokkan definisi ekonomi Islam menjadi ekonomi Islam sebagai doktrin, sistem ekonomi, ekonomi negara-negara Muslim, dan disiplin ilmiah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa istilah ekonomi Islam tidak selalu digunakan dengan cakupan yang sama. Dalam penelitian ini, ekonomi Islam dipahami sebagai kerangka ekonomi yang memuat nilai, aturan, tujuan, dan dapat dikaji secara ilmiah. Pemahaman tersebut membantu menjaga agar perbandingan dengan kapitalisme tidak hanya didasarkan pada praktik ekonomi suatu negara tertentu.

Pada dimensi filosofis atau ontologis, literatur menempatkan manusia dan aktivitas ekonomi dalam hubungan yang berbeda dengan kepemilikan dan sumber daya. Bakhri (2011) menekankan sumber wahyu dan tujuan keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Haryanto (2008) menggambarkan kapitalisme sebagai sistem yang memberi ruang besar bagi kepemilikan dan keputusan individual melalui mekanisme pasar. Ullah (2023) juga menunjukkan adanya perbedaan kerangka filosofis antara Islam dan kapitalisme. Perbedaan pandangan mengenai manusia, harta, dan tujuan aktivitas ekonomi tersebut kemudian memengaruhi prinsip yang digunakan dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Perbedaan Prinsip dan Karakteristik Sistem Ekonomi

Pada dimensi epistemologis, perbedaan dapat dilihat dari sumber pengetahuan dan batasan yang digunakan dalam menentukan tindakan ekonomi. Ekonomi Islam menggabungkan pertimbangan rasional dengan prinsip normatif Islam, sedangkan kapitalisme modern banyak menggunakan mekanisme pasar, insentif, preferensi individu, dan pertimbangan efisiensi. Mubarrok et al. (2022) menunjukkan bahwa ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah tetap memiliki hubungan dengan nilai yang membentuk objek kajiannya. Dengan demikian, cara memperoleh dan menggunakan pengetahuan ekonomi tidak sepenuhnya terpisah dari pandangan dasar masing-masing sistem. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan atau tindakan ekonomi yang dianggap tepat dapat berbeda ketika dinilai melalui kerangka Islam dan kapitalisme.

Pada dimensi aksiologis, perbedaan terlihat pada penekanan terhadap keadilan dan kesejahteraan. Azzuhri dan Fadhil (2022) menjelaskan kerangka wasatiyya yang menekankan keseimbangan dan keadilan. Dzulklepli dan Barom (2021) menghubungkan inklusi keuangan dengan tujuan keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi manfaat dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi dalam kerangka tersebut memiliki dimensi material sekaligus sosial dan moral.

Literatur tentang kapitalisme menonjolkan peranan kepemilikan privat, kebebasan ekonomi, persaingan, dan mekanisme pasar. Itang dan Daenuri (2017) serta Effendi (2019) menggambarkan kecenderungan tersebut sebagai karakter penting kapitalisme. Fauziah dan Sarkani (2023) juga membandingkan kapitalisme dan ekonomi Islam dari aspek ekonomi, sosial, dan etika. Temuan ini menunjukkan posisi sentral pasar dan insentif individu dalam kapitalisme. Namun, karakter tersebut tidak berarti seluruh praktik kapitalisme identik di semua negara karena implementasinya dapat dipengaruhi oleh regulasi dan kelembagaan.

Kepemilikan, Pasar, dan Pembiayaan

Perbedaan utama kedua sistem dapat diringkas melalui beberapa dimensi, yaitu landasan nilai, kepemilikan, mekanisme ekonomi, kesejahteraan, distribusi, dan pembiayaan. Ekonomi Islam menempatkan nilai syariah, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bagian penting dari kerangka ekonominya. Kapitalisme lebih menonjolkan kebebasan ekonomi, kepemilikan privat, insentif, pasar, dan persaingan. Perbedaan tersebut juga tampak pada pembiayaan dan distribusi kekayaan. Tabel

perbandingan berikut merupakan sintesis tematik dari literatur, bukan klaim bahwa setiap praktik ekonomi nyata selalu identik dengan model ideal masing-masing sistem.

Tabel 1. Sintesis Perbandingan Ekonomi Islam dan Kapitalisme

Dimensi	Ekonomi Islam	Kapitalisme
Landasan nilai	Nilai syariah; keseimbangan, keadilan, kemaslahatan	Kebebasan ekonomi, kepemilikan privat, insentif pasar
Kepemilikan	Diakui dengan tanggung jawab dan batas etis	Hak milik privat menjadi unsur utama
Mekanisme Ekonomi	Pasar digunakan dengan batasan syariah dan etika	Pasar dan persaingan menjadi instrumen utama
Kesejahteraan	Material sekaligus sosial dan moral	Banyak diukur melalui hasil ekonomi dan preferensi individu
Distribusi	Zakat, wakaf, sedekah dan mekanisme redistribusi	Terutama melalui pasar dan kebijakan publik
Pembiayaan	Menolak riba dan mendorong instrumen sesuai syariah	Bunga dan pembiayaan berbasis utang dapat digunakan

Sumber: Bakbri (2011); Dzulkapli & Barom (2021); Kato (2022); Fauziah & Sarkani (2023); Dairobi (2025).

Kerangka analisis menunjukkan bahwa fondasi nilai dapat memengaruhi mekanisme ekonomi, kemudian mekanisme tersebut berhubungan dengan konsekuensi terhadap distribusi dan kesejahteraan. Pola tersebut sejalan dengan Ullah (2023) dan Azzuhri dan Fadhil (2022). Artinya, perbedaan ekonomi Islam dan kapitalisme tidak cukup dipahami melalui satu indikator seperti kepemilikan atau pasar saja. Perbedaan tersebut merupakan rangkaian hubungan yang saling berkaitan antara nilai, aturan, instrumen, dan hasil sosial-ekonomi. Kerangka ini menjadi dasar untuk membahas tema-tema berikutnya secara lebih terintegrasi. Dalam dimensi kepemilikan, ekonomi Islam tidak meniadakan hak milik individu. Haryanto (2008) menekankan bahwa harta dipandang sebagai amanah dan terdapat hak pihak lain di dalamnya. Effendi (2019) menempatkan kesejahteraan individual dan sosial sebagai tujuan yang saling melengkapi. Perbedaannya dengan kapitalisme terutama berkaitan dengan batas penggunaan dan tanggung jawab sosial yang melekat pada kepemilikan. Dengan demikian, hak memiliki dalam ekonomi Islam berjalan bersama kewajiban untuk menggunakan harta secara bertanggung jawab. Membahas pembiayaan, distribusi, instrumen redistribusi, dan prinsip keadilan.

Distribusi Kekayaan dan Keadilan Ekonomi

Pada mekanisme pasar, ekonomi Islam tidak menolak pasar secara keseluruhan, tetapi memberikan batas etis dan syariah pada transaksi. Pasar tetap dapat menjadi tempat bertemunya permintaan dan penawaran serta mendorong kegiatan ekonomi produktif. Kato (2022) membandingkan model pertukaran berbasis bunga dengan joint venture yang merepresentasikan mudaraba dan menunjukkan perbedaan pola distribusi kekayaan melalui simulasi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pertukaran dapat memengaruhi pola distribusi. Namun, temuan simulasi tersebut tetap perlu dipahami sebagai model analitis dan tidak langsung digeneralisasi kepada seluruh perekonomian. Pada pembiayaan, Kato (2022) menjadikan larangan riba dan gharar sebagai karakter penting ekonomi Islam. Dalam kerangka Islam, pembiayaan dinilai bukan hanya dari keuntungan, tetapi juga dari kesesuaian akad, pembagian risiko, dan keadilan. Kapitalisme modern memberikan ruang luas bagi pembiayaan berbasis bunga dan utang sebagai salah satu mekanisme pembiayaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa struktur hubungan antara pemilik dana dan pelaku usaha dapat dirancang

dengan prinsip yang berbeda. Oleh karena itu, aspek akad, risiko, dan imbal hasil menjadi bagian penting dalam membandingkan kedua sistem.

Pada distribusi, ekonomi Islam menyediakan instrumen yang secara eksplisit diarahkan untuk mengalirkan sebagian kekayaan kepada masyarakat. Dzulkepli dan Barom (2021) menghubungkan inklusi keuangan dengan keadilan distributif, terutama melalui akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan. Kato (2022) juga memasukkan mekanisme redistribusi dalam model analitisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada hasil transaksi pasar. Instrumen sosial dan keuangan menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat. Membahas wasatiyya, kesejahteraan material dan sosial, serta orientasi kesejahteraan dalam kedua sistem.

Kesejahteraan dan Keseimbangan Ekonomi

Konsep wasatiyya memberikan lapisan tambahan dalam memahami tujuan ekonomi Islam. Azzuhri dan Fadhil (2022) menempatkan moderasi, keseimbangan, dan keadilan sebagai bagian penting dari

kerangka ekonomi tersebut. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Artinya, aktivitas ekonomi tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Prinsip keseimbangan tersebut menjadi pembeda penting ketika kebebasan ekonomi dinilai bersama dengan dampaknya. Dimensi kesejahteraan juga menunjukkan perbedaan orientasi antara kedua sistem. Bakhri (2011) menekankan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai bagian dari orientasi ekonomi Islam. Azzuhri dan Fadhil (2022) mengaitkan kesejahteraan dengan keseimbangan dan keadilan. Dairobi (2025) menyimpulkan bahwa kedua sistem sama-sama mengejar kemakmuran, tetapi pendekatannya berbeda. Dengan demikian, ukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pencapaian hasil material.

Khitam (2022) menunjukkan bahwa hubungan Islam dan kapitalisme dapat dibaca melalui orientasi kerja masyarakat Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem ekonomi tidak hanya bekerja melalui institusi formal. Nilai, perilaku, motivasi, dan pilihan ekonomi juga dapat memengaruhi bagaimana suatu sistem dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan tersebut penting karena praktik ekonomi masyarakat dapat menunjukkan perpaduan antara nilai agama dan mekanisme pasar. Oleh karena itu, analisis sistem ekonomi perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya tempat sistem tersebut diterapkan. Membahas perilaku ekonomi, penerapan analisis isi, pendekatan komparatif, dan contoh pembiayaan usaha.

Perilaku Ekonomi dan Pendekatan Metodologis

Secara metodologis, temuan mendukung penggunaan analisis isi dan pendekatan komparatif dalam studi kepustakaan. Bakhri (2011), Effendi (2019), Fauziah dan Sarkani (2023), serta Dairobi (2025) memberikan bahan untuk membandingkan prinsip dan karakteristik sistem ekonomi. Mubarrok et al. (2022) membantu mengelompokkan konsep ekonomi Islam melalui klasifikasi tematik, sedangkan Kato (2022) memberikan contoh penggunaan simulasi untuk membandingkan mekanisme pertukaran dan distribusi. Penggabungan sumber tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi pola yang berulang dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga komparatif dan interpretatif. Sebagai contoh ilustratif, pelaku usaha yang membutuhkan modal dapat menghadapi struktur pembiayaan yang berbeda. Dalam kapitalisme, pinjaman berbunga merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat digunakan berdasarkan kontrak dan ketentuan yang berlaku. Dalam ekonomi Islam, pelaku usaha dapat mempertimbangkan akad berbasis bagi hasil atau transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan cara menentukan imbal hasil dan membagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh ini menunjukkan bahwa struktur akad dan pembagian risiko merupakan bagian penting dari perbedaan prinsip kedua sistem (Kato, 2022; Dzulkepli & Barom, 2021).

Visualisasi konseptual mekanisme pertukaran dan distribusi memperlihatkan bahwa pilihan mekanisme ekonomi dapat berhubungan dengan hasil distribusi. Kato (2022) menunjukkan melalui simulasi bahwa model pertukaran berbasis bunga dan joint venture menghasilkan pola distribusi yang berbeda. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa redistribusi dapat memengaruhi pola ketimpangan dalam model yang digunakan. Temuan tersebut memperkuat pembahasan bahwa mekanisme pembiayaan dan distribusi memiliki hubungan yang penting. Namun, karena berasal dari model simulasi, hasilnya tidak boleh langsung digeneralisasi sebagai kondisi seluruh perekonomian nyata. Membahas hubungan mekanisme pertukaran dengan distribusi serta sintesis tiga tingkat perbedaan sistem.

Sintesis Perbandingan Sistem Ekonomi

Jika seluruh temuan disintesis, perbedaan utama dapat dipetakan pada tiga tingkat, yaitu fondasi nilai, instrumen ekonomi, dan implikasi sosial-ekonomi. Ekonomi Islam berangkat dari kerangka nilai Islam, menggunakan instrumen yang dibatasi syariah, dan menekankan keseimbangan serta keadilan. Kapitalisme menempatkan kebebasan kepemilikan, pasar, persaingan, dan insentif sebagai unsur sentral. Hubungan antara ketiga tingkat tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada prinsip dasar dapat memengaruhi instrumen ekonomi dan hasil yang diharapkan. Dalam praktiknya, sistem ekonomi suatu negara tetap dapat mengandung kombinasi berbagai kebijakan dan institusi.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, ekonomi Islam dan kapitalisme memiliki titik temu pada fungsi ekonomi dasar seperti produksi, pertukaran, penggunaan sumber daya, dan penciptaan kesejahteraan. Keduanya tetap memiliki mekanisme yang memungkinkan individu dan organisasi melakukan kegiatan ekonomi produktif. Perbedaannya terletak pada fondasi nilai, batas perilaku ekonomi, pembiayaan, kepemilikan, dan distribusi. Oleh karena itu, hasil penelitian paling tepat dipahami sebagai sintesis konseptual dari studi kepustakaan. Hasil tersebut bukan merupakan pengukuran empiris langsung atas

kinerja seluruh negara yang dikategorikan kapitalis atau Islam. Aspek produksi juga memperlihatkan adanya perbedaan orientasi dalam kedua sistem ekonomi. Dalam kapitalisme, keputusan produksi pada umumnya dipengaruhi oleh permintaan pasar, biaya produksi, peluang keuntungan, dan tingkat persaingan. Dalam ekonomi Islam, produksi tetap diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat, tetapi prosesnya perlu memperhatikan status halal, etika, serta dampak terhadap masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi tidak hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan keuntungan. Dalam kerangka Islam, kesesuaian proses dan manfaat yang ditimbulkan juga menjadi pertimbangan. Membahas orientasi produksi, perilaku konsumsi, serta persaingan usaha dalam perspektif kedua sistem.

Produksi, Konsumsi, dan Persaingan Usaha

Pada kegiatan konsumsi, ekonomi Islam memberikan perhatian terhadap keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan pengendalian perilaku konsumtif. Prinsip keseimbangan yang dibahas Azzuhri dan Fadhil (2022) dapat digunakan untuk memahami bahwa kesejahteraan tidak identik dengan konsumsi tanpa batas. Sementara itu, mekanisme kapitalisme memberikan ruang luas bagi preferensi konsumen dalam menentukan barang dan jasa yang dibeli. Perbedaan keduanya dapat terlihat pada batas normatif yang digunakan untuk menilai pilihan konsumsi. Dengan demikian, keputusan konsumsi dalam ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan kemampuan membeli, tetapi juga kesesuaian dengan nilai dan tujuan kesejahteraan.

Persaingan usaha merupakan unsur penting dalam mekanisme kapitalisme karena persaingan dapat mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk. Fauziah dan Sarkani (2023) menempatkan persaingan dan mekanisme pasar sebagai karakter penting kapitalisme. Dalam ekonomi Islam, persaingan pada dasarnya dapat berlangsung dalam aktivitas ekonomi, tetapi harus tetap berada dalam batas etika dan ketentuan syariah. Praktik yang merugikan pihak lain, mengandung penipuan, atau bertentangan dengan prinsip keadilan tidak sejalan dengan orientasi tersebut. Oleh karena itu, perbedaan utama bukan pada ada atau tidaknya persaingan, tetapi pada batas perilaku yang

diterapkan dalam persaingan. Perbedaan sistem juga dapat dianalisis melalui hubungan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Kapitalisme memberikan insentif keuntungan sebagai pendorong aktivitas usaha, sehingga keuntungan dapat menjadi sumber investasi, ekspansi, dan inovasi. Ekonomi Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial. Haryanto (2008) serta Abbas (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan dan aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki konsekuensi tanggung jawab. Dengan demikian, keuntungan dalam ekonomi Islam dapat berjalan bersama tuntutan untuk menjaga keadilan dan kemanfaatan sosial. Membahas orientasi kerja, keberlanjutan, keuangan inklusif, dan distribusi kekayaan.

Tenaga Kerja, Keberlanjutan, dan Distribusi

Dari sisi tenaga kerja, Khitam (2022) menunjukkan bahwa orientasi kerja dapat dipengaruhi oleh hubungan antara nilai agama dan dinamika kapitalisme dalam konteks masyarakat Indonesia. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh struktur pasar. Motivasi, nilai, lingkungan sosial, dan tujuan individu juga dapat membentuk keputusan kerja. Dalam kerangka ekonomi Islam, kerja dapat dipandang sebagai aktivitas produktif yang memiliki dimensi moral. Sementara itu, dalam kapitalisme motivasi kerja dapat berkaitan erat dengan pendapatan, karier, produktivitas, dan insentif ekonomi. Keberlanjutan menjadi aspek yang semakin penting dalam membandingkan tujuan ekonomi. Kerangka Wasatiyya yang dibahas Azzuhri dan Fadhil (2022) menekankan keseimbangan, sehingga aktivitas ekonomi idealnya tidak mengorbankan kepentingan sosial demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam perspektif komparatif, hal ini memberikan dasar untuk menilai bahwa keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari pertumbuhan. Aspek sosial dan dampak terhadap lingkungan juga relevan ketika menilai keberlanjutan. Dengan demikian, keseimbangan menjadi salah satu konsep yang dapat menghubungkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial.

Perbedaan instrumen distribusi dapat dijelaskan melalui hubungan antara hasil pasar dan kebijakan redistribusi. Dalam kapitalisme, distribusi pendapatan terutama terbentuk melalui proses produksi, kepemilikan faktor produksi, dan transaksi pasar, kemudian dapat dipengaruhi oleh kebijakan publik. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar tetap dapat berjalan, tetapi terdapat instrumen sosial seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dzulkepli dan Barom (2021) menegaskan pentingnya keuangan inklusif bagi tujuan keadilan distributif. Karena itu, keadilan dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan perluasan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Membahas pengaruh institusi, manfaat thematic synthesis, dan implikasi akhir hasil penelitian.

Institusi, Sintesis Tematik, dan Implikasi Pembahasan

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa implementasi sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh institusi. Konsep ideal suatu sistem dapat berbeda dengan praktik yang berlangsung dalam suatu negara karena terdapat pengaruh regulasi, budaya, kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan perilaku masyarakat. Khitam (2022) menunjukkan bahwa hubungan Islam dan kapitalisme dalam konteks Indonesia memiliki dinamika tersendiri. Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik ekonomi tidak selalu merupakan bentuk murni dari satu sistem teoritis. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu membedakan karakter normatif sistem dengan bentuk praktik ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan metode penelitian, pengelompokan temuan ke dalam tema fondasi, kepemilikan, pasar, pembiayaan, distribusi, kesejahteraan, dan perilaku menunjukkan manfaat thematic synthesis dalam penelitian kepustakaan. Setiap literatur memiliki fokus yang berbeda, tetapi gagasan yang berulang dapat dikelompokkan untuk memperoleh pola umum. Pendekatan komparatif kemudian digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan dari setiap tema. Analisis isi membantu peneliti mengidentifikasi gagasan utama dari sumber yang telah dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Dengan cara tersebut, pembahasan dapat disusun secara lebih sistematis dan tidak bergantung pada satu sumber saja.

Dengan demikian, pembahasan secara keseluruhan memperkuat hasil bahwa perbedaan ekonomi Islam dan kapitalisme bersifat multidimensional. Perbedaannya mencakup cara memandang

manusia dan harta, sumber aturan ekonomi, kebebasan dan kepemilikan, mekanisme pasar, pembiayaan, distribusi, konsumsi, tenaga kerja, hingga tujuan kesejahteraan. Ekonomi Islam mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan nilai syariah, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Kapitalisme lebih menonjolkan mekanisme pasar, hak milik privat, insentif, persaingan, dan kebebasan ekonomi. Meskipun demikian, keduanya dapat memiliki titik temu dalam produksi, pertukaran, inovasi, dan penciptaan kesejahteraan sehingga perbandingan perlu mempertimbangkan konteks institusional dan praktik nyata.

Tabel 2. Sintesis Tematik Hasil dan Pembahasan

Tema	Temuan utama	Referensi
Fondasi	Perbedaan berakar pada nilai, sumber legitimasi, dan tujuan ekonomi.	Bakhri (2011); Ullah (2023)
Kepemilikan	Islam mengakui kepemilikan dengan tanggung jawab; kapitalisme menekankan hak milik privat.	Haryanto (2008); Effendi (2019)
Pasar	Keduanya mengenal pertukaran, tetapi Islam memberi batas syariah dan etika.	Fauziah & Sarkani (2023); Dairobi (2025)
Pembiayaan	Perbedaan mencolok pada riba, pembagian risiko, dan struktur akad.	Kato (2022)
Distribusi	Islam memiliki instrumen redistribusi dan perhatian kuat pada keadilan distributif.	Dzulkepli & Barom (2021); Kato (2022)
Kesejahteraan	Islam menggabungkan dimensi material, sosial, dan moral.	Azzuhri & Fadhil (2022); Dairobi (2025)
Perilaku	Nilai ekonomi dapat memengaruhi orientasi kerja dan praktik sosial.	Khitam (2022)

Sumber: Hasil analisis isi terhadap literatur yang digunakan.

Komparasi Kelembagaan Pasar dan Pengawasan Etis (Hisbah)

Meskipun sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam sama-sama memanfaatkan mekanisme pasar untuk alokasi sumber daya, terdapat perbedaan mendasar dalam struktur pengawasan kelembagaannya. Dalam sistem kapitalisme pasar bebas (*laissez-faire*), efisiensi pasar diasumsikan tercapai secara otomatis melalui tangan tak terlihat (*invisible hand*) yang dipandu oleh alokasi harga pasar dan persaingan bebas. Peran negara atau lembaga pengawas dalam kapitalisme cenderung terbatas pada penegakan kontrak dan pencegahan monopoli ekstrem agar pasar tetap kompetitif.

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, pasar tidak dibiarkan bergerak bebas tanpa norma moral.

Sistem ekonomi Islam secara historis dan konseptual mengenal lembaga pengawasan pasar yang disebut **Hisbah** (yang dipimpin oleh seorang *Muhtasib*). Lembaga ini bertugas memastikan bahwa transaksi di pasar berjalan secara adil, melarang praktik manipulasi harga (*tadlis* dan *ikhtikar*), mencegah kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta mengawasi agar tidak terjadi transaksi haram seperti penimbunan barang pokok dan objek transaksi yang dilarang (*gharar* dan *riba*). Dengan demikian, keberadaan batas etis dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui pengawasan institusional aktif demi menjaga keadilan sosial (Abbas, 2012; Lubis, 2000; Rozalinda, 2017).

Implikasi Struktur Akad bagi Pengelolaan Risiko Bisnis

Perbedaan mendasar pada instrumen pembiayaan antara kapitalisme dan ekonomi Islam berimplikasi langsung pada bagaimana risiko usaha (*business risk*) ditanggung oleh para pelaku ekonomi. Dalam struktur pembiayaan kapitalis, hubungan antara penyedia modal (bank/kreditur) dan pengusaha (debitur) didasarkan pada hubungan kreditur-debitur. Penyedia modal mendapatkan imbalan tetap berupa tingkat bunga tanpa memandang apakah usaha yang dibiayai mengalami keuntungan atau kerugian. Akibatnya, seluruh risiko kegagalan usaha dialihkan (*risk transfer*) kepada pihak pengusaha. Jika usaha rugi, pengusaha tetap diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. Ekonomi Islam melarang sistem bunga (*riba*) dan menekankan prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) melalui akad kemitraan seperti *mudharabah* (bagi hasil modal-keahlian) dan *musyarakah* (penyertaan modal bersama). Jika usaha mengalami kerugian finansial yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (*managerial negligence*), kerugian tersebut ditanggung bersama secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing. Mekanisme ini menciptakan keadilan hubungan bisnis dan mendorong kemitraan yang lebih solid antara pemilik modal dan pengelola usaha (Kato, 2022; Rozalinda, 2017; Ullah, 2023).

Sistem moneter dalam kapitalisme modern bersandar pada sistem *fiat money* (uang kertas tanpa jaminan logam mulia) dan pengoperasian tingkat bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Penggunaan tingkat bunga sebagai alat kendali moneter kerap memicu spekulasi di pasar keuangan (*financial sector*) yang terpisah jauh dari sektor riil (*real sector*). Fenomena kembar ini (*decoupling*) sering menjadi penyebab krisis finansial global dan mendorong tingginya laju inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat bawah. Sementara itu, ekonomi Islam mendorong integrasi penuh antara sektor keuangan dan sektor riil. Setiap transaksi keuangan harus didukung oleh aset riil (*underlying asset*) atau aktivitas produktif nyata. Selain itu, karena melarang spekulasi moneter dan bunga, ekonomi Islam mencegah penciptaan uang yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan produksi barang/jasa, sehingga menjaga stabilitas nilai mata uang dan melindungi tingkat kesejahteraan riil masyarakat dari dampak inflasi sistemik (Bakri, 2011; Dzulkepli & Barom, 2021; Kato, 2022).

Perbandingan Operasional Sistem Sektor Riil dan Keuangan

Indikator Analisis	Sistem Ekonomi Kapitalis	Sistem Ekonomi Islam
Pengawasan Pasar	Mekanisme pasar bebas & regulasi anti-monopoli dari pemerintah	Pengawasan etika & keadilan pasar secara aktif melalui prinsip <i>Hisbah</i>
Manajemen Risiko	<i>Risk Transfer</i> (Risiko dibebankan utama kepada debitur melalui beban bunga)	<i>Risk Sharing</i> (Risiko ditanggung bersama sesuai porsi akad kemitraan)
Hubungan Sektor Keuangan dan Riil	Sektor keuangan dapat berkembang terpisah dari sektor riil (<i>decoupling</i>)	Sektor keuangan wajib terikat langsung dengan aktivitas di sektor riil (<i>underlying asset</i>)

Instrumen Penyeimbang Distribusi	Pajak negara & kebijakan jaminan sosial (<i>welfare state</i>)	Instrumen syariah wajib (Zakat) & instrumen sukarela (Infak, Sedekah, Wakaf)
----------------------------------	--	--

Landasan Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi teologis, sehingga aktivitas ekonomi tidak dipisahkan dari keimanan dan ketaatan kepada Allah (Chandra et al., 2023, hlm. 181). Dalam kerangka ini, kesejahteraan sosial ditempatkan lebih tinggi daripada perolehan keuntungan material. Al-Qur'an menjadi sumber utama yang mengatur seluruh ajaran, termasuk urusan ekonomi. Masyarakat boleh menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan perubahan kebutuhan, tetapi prinsip-prinsip dasarnya harus tetap dijaga. Islam juga memandang alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang telah menyediakan sumber daya secara cukup, sehingga kelangkaan tidak dianggap sebagai sifat bawaan alam (Chandra et al., 2023, hlm. 181–182). Menurut penulis, kelangkaan yang dijumpai muncul dari distribusi sumber daya yang tidak adil dan dari kerja yang tidak efisien. Karena itu, setiap Muslim yang mampu wajib bekerja, dan mereka yang hartanya memadai wajib membayar kewajiban finansial demi membiayai program kesejahteraan.

Sistem ekonomi Islam bertumpu pada dua asas distribusi, yaitu kebebasan dan keadilan (Chandra et al., 2023, hlm. 182). Kebebasan di sini dibatasi oleh nilai tauhid dan keadilan, berbeda dengan pandangan kapitalis yang memaknainya sebagai kebebasan bertindak tanpa campur tangan pihak lain. Prinsip pertama adalah hak milik, yakni kepemilikan hakiki ada pada Allah dan manusia hanya diberi hak untuk mengelolanya. Prinsip berikutnya adalah kewajiban kepemilikan, yaitu pemilik harta harus berbagi hasil dan tidak boleh menyia-nyiakannya atau memakainya untuk tujuan yang dilarang syariah (Chandra et al., 2023, hlm. 182–183). Selain itu, akad dan amanah menekankan bahwa perjanjian harus dihormati dan janji harus ditepati. Prinsip lainnya mencakup pengakuan atas hak dan kepentingan pribadi selama sejalan dengan kepentingan spiritual, serta pandangan bahwa bekerja bernilai ibadah. Terakhir, Islam tidak melarang kekayaan besar, tetapi melarang penimbunan agar harta terus beredar dan jurang antara si kaya dan si miskin dapat ditekan (Chandra et al., 2023, hlm. 183–184).

Perbedaan Dasar Filosofi: Sumber Hukum, Tujuan Ekonomi, dan Hak Milik

Menurut Muslim (2012: 309), berbagai teori ekonomi lahir dari jurang antara terbatasnya sumber daya dan tak terbatasnya keinginan manusia. Upaya menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup di dunia mendorong manusia mencari jalan keluar atas jurang tersebut. Dari pencarian itulah muncul aliran-aliran ekonomi, di antaranya kapitalisme dan ekonomi Islam. Kedua aliran ini sudah berbeda sejak landasan hukumnya. Ekonomi Islam berpijak pada Al-Qur'an dan Hadis, yang berlaku universal dan menjangkau seluruh sisi kehidupan, tidak hanya urusan ekonomi. Kapitalisme berpijak pada karya seperti *The Wealth of Nations* dan *The General Theory* beserta literatur pendukungnya, bukan pada wahyu. Penulis menilai ilmu kapitalis banyak dipengaruhi asumsi para tokohnya, dan asumsi itu terbentuk oleh lingkungan hidup

mereka, sehingga sistem ini baru dipahami utuh bila konteks kelahirannya diketahui (al-Assal & Abd al-Karim, 1999: 14-17). Sosialisme murni pun dipandang sebagai produk akal manusia, bukan ilham wahyu.

Karena bersumber dari wahyu, setiap kegiatan ekonomi dalam Islam bernilai pengabdian kepada Allah (Muslim, 2012: 310). Kapitalisme digambarkan sebaliknya, yakni mengagungkan individualisme, rasionalisme, dan materialisme dengan semboyan kebebasan berbuat dan bertindak (Al Kaaf, 2002: 40). Dalam kerangka itu, keberhasilan ekonomi dianggap bergantung pada usaha diri sendiri, pandangan yang disebut *anthropocentrism individualism* (Abbas, 2012: 3). Islam justru menilai keberhasilan manusia selalu terkait dengan kehendak Allah, dan manusia berkedudukan sebagai khalifah yang tunduk pada ketentuan pemberi mandat. Akibatnya, pencarian harta dibatasi cara-cara yang baik, dengan larangan atas *gharar*, *maysir*, *najsy*, dan barang haram. Penulis berpendapat bahwa kapitalisme tidak memasang batasan serupa karena orientasinya adalah pemuasan kepentingan pribadi.

Persoalan kepemilikan juga memperlihatkan perbedaan yang tajam. Dalam kapitalisme, harta hasil jerih payah sendiri menjadi milik pribadi secara penuh, sehingga pemiliknya bebas memanfaatkannya. Islam menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruh harta (QS. Thaha [20]: 6), sedangkan manusia sekadar dipercaya mengelolanya (al-Assal & Abd al-Karim, 1999: 40-47). Meski begitu, Islam tetap mengakui hak milik, hanya saja hak tersebut dibatasi ketentuan yang menjaga kepentingan masyarakat luas dan mencegah kerugian bagi orang lain (Muslim, 2012: 311). Kepemilikan dibedakan menjadi milik khusus, yang berakar pada kecenderungan alami manusia menyukai harta (QS. al-Fajr [89]: 19-20), dan milik umum seperti jalan, sungai, tambang, serta sumber minyak yang dikelola negara. Landasan milik umum adalah hadis riwayat Abu Dawud tentang keserikatan kaum Muslim dalam air, rumput, dan api (Abu Dawud, t.th.: III, 295). Dalam urusan pasar, kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah, sedangkan Islam memiliki lembaga hisbah yang mengawasi pasar demi kemaslahatan umat (Hasan & Ahmad, 2025: 198-198).

Sejarah dan Tokoh Ekonomi Islam dibandingkan Lahirnya Kapitalisme

Muslim (2012: 312) menyatakan bahwa ekonomi Islam sudah dijalankan sejak masa Rasulullah Saw. (569-632 M) di tengah masyarakat Mekah dan Madinah. Estafet praktik ini dilanjutkan Khulafaur Rasyidin yang memerintah selama 29 tahun (632-661 M). Setelahnya, praktik tersebut berlanjut hingga masa kejayaan Islam di Turki. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pengelolaan anggaran negara, dan mekanisme pasar disebut telah berjalan sejak era Rasulullah (Amalia, 2005: 16-61). Menurut penulis, perjalanan pemikiran ekonomi Islam ini turut membentuk peradaban yang besar. Sumbangan para ulama di bidang ekonomi juga dipandang sebagai penopang bangkitnya peradaban Islam pada masa lampau.

Sejumlah tokoh disebut penulis sebagai pemikir ekonomi Islam. Abu Yusuf (w. 182 H) mencetuskan gagasan tentang kebijakan fiskal, keuangan publik, dan mekanisme pasar (Amalia, 2005: 70-85). Yahya bin Umar (213-289 H) membahas penetapan harga dan penimbunan (Amalia, 2005: 116-118), sementara al-Ghazali (450-505 H) menelaah mata uang, pasar, dan pajak (Amalia, 2005: 123-130). Ibnu Khaldun (732-808 H) banyak menulis tentang pengangguran, keuangan publik, dan perdagangan internasional (Amalia, 2005: 192-202). Di sisi lain, kapitalisme baru dirumuskan Adam Smith pada 1776 M, jauh setelah para ekonom Muslim itu berkarya. Berdasarkan rentang waktu tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Islam lebih dulu hadir dan lebih mampu menjawab persoalan ekonomi, terlebih sosialisme dianggap runtuh bersama Uni Soviet (Muslim, 2012: 313).

KESIMPULAN

Sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam memiliki sejumlah kesamaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seperti kegiatan produksi, pertukaran, kepemilikan secara individu, serta penggunaan mekanisme pasar untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun demikian, kesamaan dalam aktivitas ekonomi tersebut tidak berarti bahwa kedua sistem memiliki landasan dan orientasi yang sama. Perbedaan keduanya terutama terlihat pada nilai, aturan, batasan, serta tujuan yang mendasari pelaksanaan kegiatan ekonomi. Perbedaan utama antara kapitalisme dan ekonomi Islam dapat dilihat dari landasan filosofis atau worldview yang digunakan. Kapitalisme pada umumnya berkembang dari pandangan sekuler yang menempatkan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, persaingan, dan pencapaian keuntungan sebagai unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, ekonomi Islam berlandaskan worldview yang bersumber dari wahyu, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab manusia. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi dalam Islam harus diarahkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi masyarakat.

Perbedaan paradigma tersebut juga terlihat dalam aspek ontologi dan epistemologi, khususnya dalam memahami manusia, harta, dan sumber pengetahuan ekonomi. Dalam perspektif Islam, harta merupakan amanah dari Allah yang penggunaannya harus mempertimbangkan kepentingan dan hak orang lain. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki harta secara pribadi, tetapi kepemilikan tersebut tetap disertai dengan kewajiban sosial. Berbeda dengan itu, kapitalisme memberikan kedudukan yang

kuat terhadap hak kepemilikan privat dan kebebasan individu dalam menentukan aktivitas ekonominya, sedangkan pengetahuan ekonomi banyak dikembangkan melalui mekanisme pasar, perilaku individu, serta pertimbangan mengenai efisiensi. Perbedaan landasan nilai tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap prinsip dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, terutama berkaitan dengan kebebasan ekonomi, etika transaksi, dan arah kebijakan. Ekonomi Islam tetap mengakui keberadaan pasar sebagai mekanisme dalam aktivitas ekonomi, tetapi penggunaannya dibatasi oleh ketentuan syariah. Beberapa bentuk transaksi seperti riba dan gharar dilarang, sementara kegiatan ekonomi harus dilaksanakan melalui akad yang jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip pembagian risiko. Sebaliknya, sistem kapitalisme modern memberikan ruang yang relatif lebih besar bagi perkembangan pasar dan instrumen keuangan, termasuk penggunaan bunga dan utang, selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Perbedaan antara kedua sistem juga dapat diamati dalam mekanisme pembiayaan dan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam mengenal berbagai instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memiliki fungsi sosial dalam membantu pemerataan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang membutuhkan. Instrumen tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, distribusi pendapatan pada dasarnya terbentuk melalui aktivitas produksi, kepemilikan sumber daya atau faktor produksi, serta mekanisme transaksi di pasar. Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan, tetapi tidak memiliki instrumen redistribusi yang didasarkan pada kewajiban keagamaan sebagaimana terdapat dalam ekonomi Islam. Aspek lain yang membedakan kedua sistem adalah konsep kesejahteraan yang hendak dicapai. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan tidak sebatas pada keberhasilan memperoleh kekayaan atau memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mencakup tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat yang disebut *falāh*. Konsep tersebut berjalan bersama prinsip keadilan dan keseimbangan atau *wasatīyya* dalam kehidupan ekonomi. Sementara itu, kapitalisme lebih banyak menempatkan pertumbuhan ekonomi, efisiensi, inovasi, produktivitas, dan peningkatan pendapatan sebagai indikator penting kemajuan ekonomi. Dalam perspektif Islam, pencapaian kesejahteraan juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pada aspek perilaku ekonomi, perbedaan antara kapitalisme dan ekonomi Islam dapat dilihat dalam aktivitas konsumsi, produksi, persaingan, serta motivasi dalam bekerja. Islam mengajarkan agar konsumsi dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan, sedangkan kegiatan produksi diarahkan pada barang atau jasa yang halal, baik, dan memberikan manfaat. Persaingan dalam kegiatan usaha juga diperbolehkan selama dilakukan secara sehat, jujur, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Di sisi lain, kapitalisme memberikan kebebasan yang lebih luas kepada konsumen dalam menentukan pilihan serta mendorong pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan efisiensi melalui persaingan, sedangkan aspek tanggung jawab sosial umumnya dijalankan melalui regulasi pemerintah maupun inisiatif sukarela dari pelaku ekonomi. Dengan demikian, perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam menunjukkan adanya perbedaan yang luas dan tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan ekonomi. Perbedaan tersebut mencakup landasan nilai, cara memandang kepemilikan, pengaturan pasar, mekanisme pembiayaan, distribusi kekayaan, serta konsep kesejahteraan.

Meskipun kedua sistem memiliki kesamaan dalam beberapa aktivitas ekonomi dasar, penerapan dan tujuan dari aktivitas tersebut dapat berbeda karena masing-masing dibangun berdasarkan paradigma yang berbeda. Oleh karena itu, kajian mengenai kapitalisme dan ekonomi Islam perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek filosofis, norma, serta institusi yang membentuk penerapan kedua sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2012). Sistem ekonomi Islam: Suatu pendekatan filsafat, nilai-nilai dasar, dan instrumental. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2542>
- Azzuhri, A., & Fadhil, H. M. (2022). Reimagining economic wellbeing and justice: The Wasatiyya framework in Islamic economics. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 225–241. <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.14139>
- Bakhri, B. S. (2011). Sistem ekonomi Islam dalam perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42–49. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1536>
- Dairobi. (2025). Perbandingan sistem ekonomi Islam dan kapitalisme (Suatu kajian literatur). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 6(1). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i1.328>
- Dzulkepli, S., & Barom, M. N. (2021). Financial inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 66–77. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.330>
- Effendi, S. (2019). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147–158.
- Fauziah, D. R., & Sarkani, S. (2023). Analisis perbandingan sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. *Aksioma Al-Musaqob*, 6(2). <https://doi.org/10.55171/jam.v6i2.961>
- Haryanto, R. (2008). Sistem ekonomi (kajian komparatif antara sistem ekonomi kapitalis dan Islâm). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 3(1), 63–80. <https://doi.org/10.19105/allhkam.v3i1.2610>
- Ilham, R. C., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2024). Perbedaan dasar antara ekonomi Islam & ekonomi kapitalis. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 304–317. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.663>
- Itang, & Daenuri, A. (2017). Sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1143>
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLOS ONE*, 17(9), e0275113. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Khitam, H. (2022). Islam and capitalism: The dynamics of religion and contemporary Indonesian work orientation. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 19(1), 45–63. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v19i1.5226>
- Mannan, M. A. (1993). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf. Rozalinda.
2017. *Ekonomi Islam*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- K.Lubis Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Mubarrok,
- U. S., Ulfi, I., & Izzulhaq, M. A. (2022). What is Islamic economics? An attempt to classify the definitions of Islamic economics. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 144–153. <https://doi.org/10.21700/perisai.v6i2.1616>
- Rostiani, H., Aditya, & Muchlis, S. (2025). Transformasi nilai ekonomi: Kajian historis perbedaan ekonomi Islam dan kapitalis. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 963–969. <https://doi.org/10.63822/ka1y1j23>
- Ullah, A. (2023). Philosophical foundations of economics – A comparative study of Islamic economics, capitalism and Marxism. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2), 1–18. <https://doi.org/10.53840/ijiefer99>
- Chandra, Al-Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Analisis perbandingan ekonomi Islam dengan kapitalisme. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(4), 177–189. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.767>
- Abbas, Anwar. 2012. *Philosophy Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta, 14 Maret 2012.
- Abdul Fattah, Dede. 2011. *Pasar dan Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Peran* <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

